

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

A.G Kartasapoetra. (2007). *Koperasi Indonesia*. PT. Rineka Citra.

Budiman, M. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Setara Press.

Effendi, M. dalam E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama.

Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatahn Kontemporer*. PT. Citra
Aditya Bakti.

Hakim Abdul Azis. (2011). *Negara Hukum Dan Demokrasi* . Pustaka Pelajar.

Melani. (2020). *Eksistensi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Lekkas.

Puspa, S. (n.d.). *Buku Pintar Peribahasa Indonesia*.

Rosa Agustina. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Pasca Sarjana FH UI.

Hendrojogi. (2010). *Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik*. Rajawali Pres.

Muhammad, S. (2015). *pengantar ilmu hukum*. kencana.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang hukum pidana, 1 (2012).

Presiden Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kpk, 1951(8), 1–142. https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu_8_1981.pdf

Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2000). *UUD Negara RI Tahun 1945*. 1–28.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>

Menteri/sekretaris negara Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. *Lembaran Negara Republik Indonesia*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (“Propam”) Polri.

C. Sumber Lain

Haryadi, L., & . S. (2017). Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto Dari Perspektif Pancasila Dan Kode Etik Profesi Hakim. *Law Reform, 13(2)*, 164. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16153>

- Hasanah S. (2017). *Arti penafsiran Hukum Argumentum A Contrario*.
[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4dfl6aec3d/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i/Putusan Pengadilan Negeri kelas IA khusus kota Bandung nomor :39/pid.sus/2020/pn.bdg,2020](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4dfl6aec3d/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i/Putusan%20Pengadilan%20Negeri%20kelas%20IA%20khusus%20kota%20Bandung%20nomor%20:39/pid.sus/2020/pn.bdg,2020)
- Kusumaatmadja Mochtar. (2013). *Jurnal Mochtar Kusumaatmadja*. 100–101.
- Meilanny, B. (2017). *mengurai konsep dasar manusia sebagai individu melalui relasi sosial yang di bangunnya*. 4, 106.
- Budiman, M. (2020a). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyelenggara Negara Pada Saat Pemilu*. 205.
<https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/3164/1543>
- Budiman, M. (2020b). Penerapan Pasal 5 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 73–87.
<https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.391>
- Samosir, P. A. . L. dan C. D. (n.d.). *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*.
- Siregar, S. A., & Manalu, K. A. (2020). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 12.
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.815>